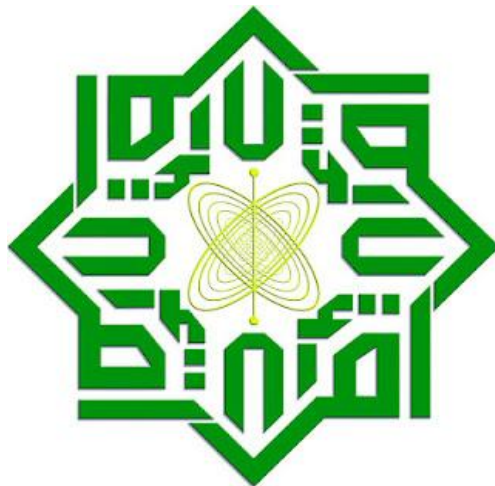


SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mengikuti Ujian Comprehensif
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*



OLEH:

RESTI NERI
10873004326

KONSENTRASI PAJAK

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

OLEH : RESTI NERI

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya. Adapun populasi yang dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan random sampling (acak) dan metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah dengan rumus slovin.

Penulis melakukan penelitian ini cara melakukan penyebaran kuesioner. Analisa data penulis gunakan bersifat kuantitatif yaitu menganalisa data melalui persamaan regresi linear berganda dengan uji T parsial dan uji F simultan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa uji ANOVA didapat F hitung 374,299 dengan tingkat signifikan 0,000 hal ini menunjukkan pengaruh variabel independen secara keseluruhan signifikan, dengan F hitung $374,299 > F$ tabel 3,090. Maka kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak terutanganya. Selanjutnya secara parsial nilai T hitung dari kedua variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan -2,571 dengan signifikansi 0,012, kesadaran wajib pajak 15,327 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dari T tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari hasil uji determinasi yang mana nilai R^2 sebesar 0,885 atau sebesar 88,5% variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan sebesar 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keyword : Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR



Setinggi puji sedalam syukur disertai Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang telah memberikan rahmat, nikmat kesehatan, hidayah, dan kesempatan dari Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karna atas perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat hidup di zaman yang berintelektualitas dan dalam masa modernisasi islam yang maju seperti di kampus madani UIN SUSKA RIAU Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Yaminur dan Ibunda Ismayani tercinta yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untukku. Atas kemudahan yang aku dapatkan khususnya materi yang tidak sedikit Ayah dan

Ibu keluarkan, tanpa Ayah dan Ibu Aku bukan apa-apa. Semua yang Ayah dan Ibu berikan tidak akan mungkin bisa ananda balas, dan akan selalu ananda kenang sepanjang masa.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MBA. selaku rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, Sp,M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE. M.Si. Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1.
5. Bapak Khairil Henry SE.M.Si, Ak selaku pembimbing dan Dosen Konsultasi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Susnaningsih M, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah memotivasi dari awal kuliah sampai sekarang.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada Bapak Darmawan selaku Kepala Sub Bagian Umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan seluruh pegawainya, terima kasih atas waktu, kesepakatan serta bantuan sehingga penulis bisa melaksanakan penelitian ini.
9. Kakakku tersayang Yendra Wanis dan Abang Iparku Syukri Wahit serta Adekku tersayang Wandika Syaputra dan buat keponakanku Alya dan Ellina yang telah banyak membantu, memberikan motivasi karena kalian lah yang menjadi penyemangatku dalam penyelesaian skripsi ini dan juga bisa memberikan contoh teladan yang baik buat keluarga kita.

10. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan berupa materi, motivasi, dan mendo'akan serta memberikan kasih sayang yang begitu tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat sahabat-sahabatku seperjuangan Doche Sestria Ningsy SE, Susi Susana SE, Susanti, Khairul Anwar SE, Iskandar SE, yang sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. serta teman-teman di Akuntansi lokal C, konsentrasi Pajak, dan konsentrasi lainnya. Terimakasih atas sokongan dan kerjasamanya, perjalanan selama 4 tahun tidak akan dapat penulis lupakan.
12. Buat Adek-adekku Ega, Ikis, Garet, dan Yanti, yang selalu memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-temanku yang belum disebutkan di atas karena keterbatasan penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis. Semoga do'a, motivasi, perhatian dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT, *amiiiiiin*. Terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2012

Penulis,

RESTI NERI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2 Definisi Wajib Pajak Orang Pribadi	10
2.3 Fungsi Pajak.....	12
2.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.5 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan	15
2.5.1 Sanksi Administrasi	15
2.5.2 Sanksi Pidana.....	22
2.6 Persepsi atas Sanksi Perpajakan.....	27
2.7 Kesadaran Wajib Pajak	28
2.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.9 Persepsi Atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.10 Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan	33

2.11 Tinjauan Pajak dalam Islam	34
2.12 Model Penelitian	37
2.13 Hipotesis	37
2.14 Variabel Penelitian	38
2.15 Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Desain Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Jenis Dan Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Populasi dan Sampel	41
3.5.1 Populasi	41
3.5.2 Sampel	42
3.6 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel	43
3.6.1 Variabel Independen (X1)	43
3.6.2 Variabel Independen (X2)	44
3.6.3 Variabel Dependen (Y)	44
3.6.4 Pengukuran Variabel	45
3.7 Analisis Deskriptif	46
3.8 Pengujian Kualitas Data	47
3.8.1 Uji Validitas	47
3.8.2 Uji Reliabilitas	47
3.9 Uji Asumsi Klasik	48
3.9.1 Uji Normalitas Data	48
3.9.2 Uji Multikolinearitas	48
3.9.3 Uji Autokorelasi	49
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas	49
3.10 Pengujian Hipotesis	50

3.10.1 Uji T (Uji Parsial).....	51
3.10.2 Uji F (Uji Simultan)	51
3.11 Koefisien Determinasi	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 karakteristik Responden.....	53
4.1.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.1.2 Profil Responden Berdasarkan Usia.....	55
4.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
4.1.4 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	57
4.1.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan	58
4.2 Deskriptif Statistik	59
4.3.pengujian Kualitas Data.....	60
4.3.1 Uji Validitas	60
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	63
4.4 Uji Asumsi Klasik	65
4.4.1 Uji Normalitas Data	65
4.4.2 Uji Multikolinearitas	66
4.4.3 Uji Autokorelasi	68
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas	69
4.5 Uji Hipotesis dan Pembahasan	69
4.5.1 Hasil Uji Secara Parsial (T).....	72
4.5.2 Hasil Uji Secara Simultan (F)	76
4.6 Koefisien Determinasi	77
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

II.1	Ketentuan Pengenaan Sanksi Denda.....	16
II.2	Ketentuan Pengenaan Sanksi Bunga.....	18
II.3	Ketentuan Pengenaan Sanksi Kenaikan.....	20
II.4	Ketentuan Pengenaan Pidana Kurungan.....	23
II.5	Ketentuan Pengenaan Pidana Penjara.....	24
III.1	Operasionalisasi Variabel.....	45
IV.1	Tingkat Pengumpulan Kuesioner.....	54
IV.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
IV.3	Profil Responden Berdasarkan Usia.....	55
IV.4	Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	56
IV.5	Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	57
IV.6	Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan.....	58
IV.7	Statistik Deskriptif.....	59
IV.8	Hasil Uji Validitas Variabel X1.....	61
IV.9	Hasil Uji Validitas Variabel X2.....	62
IV.10	Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	63
IV.11	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Data.....	64
IV.12	Hasil Uji Normalitas Data.....	65
IV.13	Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
IV.14	Uji Autokorelasi.....	68
IV.15	Hasil Regresi Berganda.....	70
IV.16	Hasil Pengujian Hipotesis.....	73
IV.18	Hasil Uji Simultan (F).....	75
IV.19	Hasil Koefisien Determinasi.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamakan atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan diberbagai bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Dalam pembangunan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini

mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform*/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pajak baru dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “*self assessment*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009).

Dengan diberlakukannya sistem ini jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu

untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa sudah kehilangan pekerjaan (Erlangga Djumen, 2011).

Menurut Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jendra Pajak pada 2010, 14.101.933 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen. Ini masih naik dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009 (Liberti Pandiangan, 2011).

Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2009 terdapat 10.682.099 wajib pajak terdaftar, 9.996.620 wajib pajak terdaftar SPT, dan 5.413.114 SPT tahunan PPh sehingga rasio kepatuhannya sebesar 54,15 persen. Pada tahun 2010 terdapat 14.101.933 wajib pajak terdaftar SPT dan 8.202.309 terdaftar SPT tahunan PPh sehingga rasio kepatuhannya sebesar 58,16 persen. Rasio kepatuhan WP Orang Pribadi sampai akhir 2011 sebesar 54,72% atau sebanyak 8.812.251 dari total 16.104.163 WP pribadi yang terdaftar. Pada tahun ini Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan sebesar 62,5 persen dengan wajib pajak yang terdaftar per Januari 2012 sebanyak 19.881.684 wajib pajak orang pribadi. (Dedi Rudaedi, 2012).

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari Petugas Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, banyak masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Indikasi lain yang menyatakan bahwa wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang

diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Teguran (David, 2012).

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi “rampung”. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan. Maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut (Gunadi, 2002). Didukung oleh pernyataan bahwa perkembangan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang menggembirakan dari tahun ke tahun, maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas (Suharno, 2005).

Selain penerapan sanksi perpajakan kesadaran wajib pajak pun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan

menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri, dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat atau penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif, pajak masih menjadi momok bagi orang banyak. Karena Mereka tidak menyadari kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (M. Said, 2003).

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat digali secara optimal. Untuk kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin dalam Ester Tambunan, 2004).

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhannya di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhannya di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan dan parsial di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

- c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau bahan dokumentasi mengenai keterkaitan antara Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 5 bab yang merangkum latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan sajikan pada tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi Lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang profil responden dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan 2008:10).

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah. (Siahaan 2008:5).

Pajak menurut Rochmat Soemitro seperti yang dimuat dalam buku Hukum Pajak oleh Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton (2004:5). “ Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik

yang bisa langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum seperti retribusi (Wiryawan B. Ilyas 2004:5).

2.2 Definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak tertentu (UU No 9 Tahun 1994). Untuk lebih lengkapnya yang termasuk dalam pengertian wajib pajak adalah :

1. Setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun pajak diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
2. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (penjelasan pasal 1 ayat KUP).
3. Badan termasuk BUT
4. Wajib pajak termasuk pemotong
5. Pengusaha kena pajak.

Wajib pajak dilihat dari subjek pajaknya dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangan di Indonesia tidaklah harus berturut-turut, subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila mereka telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia tidaklah berturut-turut, tetapi mereka melakukan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dan penghasilan di Indonesia atau diperoleh mereka melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jenis-jenis Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi sering juga disingkat dengan WPOP.

Wajib pajak orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi :

- a. WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - b. WP orang pribadi yang diberikan kekuasaan warisan yang belum dibagi.
 - c. Karyawan atau karyawan yang memperoleh penghasilan diatas PTKP.
 - d. WNI yang bekerja pada bukan subjek pajak penghasilan.
2. Wajib pajak badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, BUMN, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, dan bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (UU pasal 1).

2.3 Fungsi Pajak

Negara mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan Bs. Ilyas dan Ricard Burton dalam buku Hukum Pajak yaitu:

1. Fungsi budgeter

Fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia, fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan dengan baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).

4. Fungsi distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak negara maupun pajak daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Mardiasmo,2011:2-3).

1. Syarat Keadilan

Adalah adil yang bersifat horizontal dan adil yang bersifat vertikal. Adil yang bersifat horizontal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya sama harus memikul beban pajak yang sama pula. Sedangkan adil yang bersifat vertikal adalah orang atau wajib pajak yang kondisinya berbeda harus memikul beban pajak yang berbeda pula.

2. Syarat Yuridis (Berdasarkan Undang-Undang)

Pemungutan pajak harus mengacu pada hukum pajak yang berlaku sehingga dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik itu negara atau untuk warga negaranya. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang".

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansii

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

2.5.1 Sanksi Administrasi

Menurut Early Suandy (2008:155), sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213), pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.

Ketentuan sanksi administrasi dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat tiga macam sanksi, yaitu:

1. Denda

Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak (PPN). Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu penetapan denda pasal 25 ayat 9 jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Sanksi administrasi ini termasuk kategori denda karena dilakukan untuk menghindari pengenaan bunga dua kali. Sehubungan dengan sanksi untuk utang pajak jatuh tempo yang tidak dibayar dikenakan bunga sebesar 2% per bulan sesuai pasal 19 ayat 1 KUP.

Tabel II.1
Ketentuan Pengenaan Sanksi Denda

No	Masalah	Besarnya Denda
1	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000 untuk SPT Masa Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Orang pribadi.
2	Pembetulan sendiri, SPT	Ditambah 150%

	tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik.	
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usahanya b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	Ditambah 2% denda dari Dasar pengenaan Pajak (DPP).
4	Khusus PBB : a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	(Maksimum 24 bulan) SKPKB denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : *Early Suandy (2008:156)*

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas kewajiban pelaporannya.

2. Sanksi Bunga

Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut Sony Devani dan Siti Kurnia Rahayu (2006:168) adalah sebagai berikut:

“Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak”

Sedangkan pengertian sanksi berupa bunga menurut Soemarso (2007:145) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Bunga adalah wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, sanksi bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No. 28 Tahun 2007.

Tabel II.2
Ketentuan Pengenaan Sanksi Bunga

Masalah	Besar/lamanya sanksi	Cara membayar/ menagih	Dasar Hukum
Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu.	SSP	Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000
Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa/bagian tahun pajak s.d diterbitkannya SKPKB	SKP	Pasal 13 ayat (2)
Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang tidak atau kurang bayar	2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal	STP	Pasal 19 ayat (1)

	diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.		
Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	SSP/STP	Pasal 19 ayat (2)
Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT	2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan	STP	Pasal 14 ayat (3)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan setelah lewat waktu 10 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB	SKP	Pasal 13 ayat (5)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan setelah lewat waktu 10 tahun	48% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT	SKP	Pasal 15 ayat (4)

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang berhubungan dengan pembukuan yang

tidak benar, NPWP jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, dan tidak menyampaikan SPT.

Tabel II.3
Ketentuan Pengenaan Sanksi kenaikan

No	Masalah	Sanksi	Cara Membayar/ Menagih	Dasar Hukum
1	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan	50% dari jumlah pajak yang kurang bayar	SKP	Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
2	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur tidak disampaikan pada waktunya	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak b.100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya	100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

	dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%			2007
4	Kewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. c. 100% dari PPN dan PPnBm yang tidak atau kurang dibayar.	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
5	Ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang	100% dari jumlah kekurangan pajak	SKP	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
6	Diterbitkan SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	SKP	Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

2.5.2 Sanksi Pidana

Menurut Early Suandy (2008:155), sanksi pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan akibat tidak dipatuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan muncul pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan denda kurungan.

Tabel II I.4
Ketentuan Pengenaan Pidana Kurungan

Masalah	Sanksi	Dasar Hukum
Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,	Dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 38 Undang-undang nomor 28 Tahun 2007
Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,	Dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)	Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Wakil kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, menganjurkan	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1	Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Undang-undang

atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38	(satu) tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Nomor 16 Tahun 2000
--	---	---------------------

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Tabel II.5

Ketentuan Pengenaan Pidana Penjara

Masalah	Sanksi	Dasar hukum
Setiap orang yang dengan sengaja :	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau		
Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak		

benar atau tidak lengkap		
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29		
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau		
Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,		
Melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu 1 tahun, terhitung sejak selesainya pidana penjara	Pidana dilipatkan menjadi dua kali	Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak	Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan	Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Pasal 41B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39	Pidana Penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41A	Pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000	Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
Yang menyeluruh melakukan, yang turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41B	Pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000	Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

2.6 Persepsi atas Sanksi Perpajakan

Persepsi menurut Rakhman Jalaludin (2002:51) adalah Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu harapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Pengertian persepsi menurut Bimo Wagito (2002:54) adalah Pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu.

Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006:19) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut M. Zain (2008:57) persepsi atas sanksi perpajakan adalah Interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan.

Menurut M. Zain (2008:83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa kriteria, di antaranya:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Menurut Early Suandi (2008:155), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam melaksanakan *self assessment system* (Pamungkas, 2003). Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan ingat kepada hal-hal yang benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:975).

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan

kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran menurut Liana Ekawati (2010:77) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:1012) menyatakan bahwa: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:110) menyatakan bahwa: “Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

yaitu Suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
3. Membayar yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Kiryanto (2006:16) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan”.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa:

Kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

“Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

2.9 Persepsi Atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2010 : 174) menyatakan bahwa wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.”

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa agar undang-undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak”.

Menurut Gatot S. M Faisal (2009:37), menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

2.10 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Oliver Oldman dalam (Ester Tambunan 2011:28) menyatakan bahwa Melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.”

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Liana Ekawati (2009 : 78) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.”

Dari teori yang telah dikemukakan di atas disimpulkan bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar bahwa fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.11 TINJAUAN PAJAK DALAM ISLAM

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *Kharaji* dipungut secara *dharibah* yaitu secara wajib.

Adapun pajak dalam Islam dapat kita dalam al-Qura'an Surat Attaubah ayat 29 seperti berikut :



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Di dalam Islam menurut ulama Abdul Qadi Zallum (Gusfahmi, 2007:32) mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dari definisi di atas terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu:

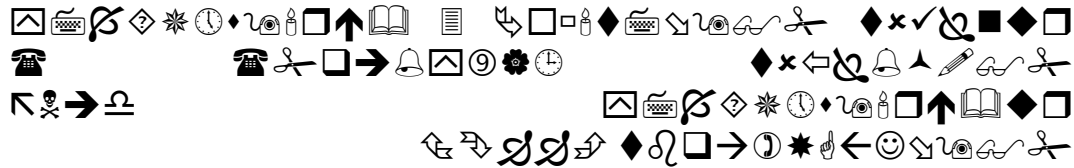
1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*).
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukannya untuk kondisi darurat (khusus), yang segera harus diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

1. Harus adanya *nash* (Alquran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.

3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan makmur yang mempunyai kelebihan sangat memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

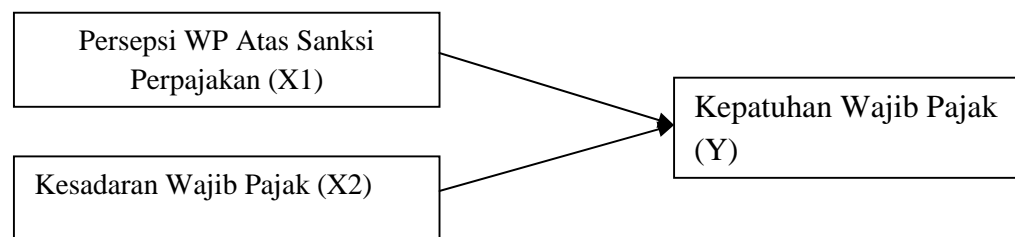
Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan di bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak ditetapkan negara, antara lain sebagai berikut. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah : 177.



Artinya : “ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(Al-Baqarah : 177).

2.12 MODEL PENELITIAN

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut ini.



Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

2.13 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2005 : 10) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya diketahui setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.
- H2 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.

2.14 VARIABEL PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan topik pembahasan di atas adapun variabel-variabel yang diambil yaitu:

1. Variabel Independen terdiri dari:
 - a. Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan (X1)
 - b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

2. Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.15 PENELITIAN TERDAHULU

1. Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto

Dengan judul skripsi Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja(2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto yaitu sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja.

2. Ester Tambunan

Dengan judul skripsi pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung (2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ester Tambunan dengan variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pada dasarnya dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat eksplantasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiyono,2005).

Berdasarkan tingkat eksplantasi dan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kuisioner yang diberikan berupa pertanyaan yang akan diberi nilai.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, yang terletak di Jl. SM Amin (Ring Road) Arengka II.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana data utama yang dipakai untuk menjawab masalah yang diteliti yaitu data mengenai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dimana data ini diperoleh langsung dari sumbernya langsung dan tidak melalui perantara apapun.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pengamatan langsung atau Observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Kuesioner (Angket)

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

3.5 Populasi dan sampel

3.5.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono

:2008:90). Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang statusnya masih aktif.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono:2008:91). Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah menggunakan teknik *random sampling* yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang di nilai dapat mewakili keseluruhan responden penelitian.

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun data jumlah wajib pajak perseorangan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah 80.207 pada tahun 2011. Jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin dalam (Husein Umar,2008) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditoleransi 10%.

$$n = \frac{80.207}{1 + 80.207 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{80.207}{1 + 802,07}$$

$$n = \frac{80.207}{803,07}$$

$$n = 99,88/100 \text{ orang}$$

Jadi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Alasan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin adalah untuk memperkecil jumlah responden yang terlalu banyak, sehingga mempersulit dalam penyebaran kuesioner.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak sebagai responden penelitian. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) pada KPP Pekanbaru Tampan dan dalam proses menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya (tidak diwakilkan).

3.6 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu :

3.6.1 Variabel Independen (X1)

Untuk mengukur persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari pengetahuan wajib pajak mengenai Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk

mendidik wajib pajak, penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Variabel ini diukur dengan menggunakan 8 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ester Tambunan (2011).

3.6.2 Variabel Independen (X2)

Untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat dilihat dari mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Variabel ini diukur dengan menggunakan 8 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ester Tambunan (2011).

3.6.3 Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ester Tambunan (2011).

3.6.4 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk *checklist*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan untuk suatu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) dengan 4 poin, netral (N) dengan 3 poin, tidak setuju (KS) dengan 2 poin, tidak setuju (TS) dengan 1 poin.

Berdasarkan uraian di atas, operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X ₁)	Persepsi atas sanksi perpajakan adalah Persepsi wajib pajak tentang sanksi wajib pajak tentang sanksi perpajakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. (M.Zain : 2008)	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan: 1. Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. (M.Zain:2008)

Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. (Safri nurmantu : 2005)	Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak, diantaranya : 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. (Irianto : 2005)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano:2006)	Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana : 1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

3.7 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk memberi gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006).

3.8 Pengujian Kualitas Data

3.8.1 Uji Validitas

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa seharusnya diukur. Penentuan validitas data menggunakan korelasi Pearson (Indrianto dan Supomo, 2002:179-180). Sebelum dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian data terhadap variabel tersebut. Uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuisioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, dengan kata lain sejauh mana alat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan memilih item-item pertanyaan yang relevan untuk dianalisis.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) $<0,6$ tidak reliabel, (b) $0,6-0,7$ *acceptable*, (c) $0,7-0,8$ baik dan (d) $>0,8$ sangat baik.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

3.9.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2003:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari α 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

3.9.2 Uji Multikolonearitas

Untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinieritas. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Menurut Ghozali (2005:91) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai *VIF*>10.

3.9.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Imam Ghazali, 2006 : 95). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah autokorelasi. (Singgih Santoso, 2004: 218), mengemukakan secara umum deteksi adanya korelasi bias difokuskan pada uji Durbin-Watson :

1. Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

3.9.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terjadi ketidakpastian varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model yang regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas (Iman Ghazali : 2006 : 105).

3.10 Pengujian Hipotesis

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner dengan memberikan

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linier Berganda, dimana variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) variabel independennya ialah Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2).

Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e.$$

Keterangan :

- Y = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).
- X_1X_2 = Variabel Bebas I, II (Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak).
- a = Konstanta
- b_1 dan b_2 = Koefisien Regresi
- e = Galat (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.10.1 Uji Parsial (Uji T))

Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji koefisien secara parsial antara masing-masing variabel bebas (persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-k, artinya kemungkinan kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengambil keputusan.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien regresi adalah signifikan dan hipotesis penelitian diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien regresi tidak signifikan dan hipotesis penelitian ditolak.

3.10.2 Uji Simultan (uji F).

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} .

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ disebut signifikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ disebut tidak signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.11 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Dwi Priyatno : 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, untuk langkah selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 16,0. Penyebaran kuesioner dimulai pada bulan Mei sampai dengan selesai.

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 100 kuesioner, semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 100 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel VI.1.

Tabel IV.1
Tingkat Pengumpulan kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Total Kuesioner Yang di Sebarkan	100
Total Kuesioner yang Terkumpul Kembali	100
Total Kuesioner yang Dapat Diolah	100
Persentase Pengembalian Kuesioner ($100/100 \times 100\%$)	100 %

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian menyebarkan 100 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 100 kuesioner atau 100%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 100 kuesioner atau 100%.

4.1.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat pada tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	58	67%
Perempuan	42	33%
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer yang diolah penulis, 2012

Berdasarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 58 orang atau sebesar

42% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 42 orang atau sebesar 42%. Mayoritas responden adalah laki-laki disebabkan Wajib Pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan di mana laki-laki biasanya adalah tulang punggung keluarga.

4.1.2 Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel IV.3
Profil responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
< 30 tahun	33	33%
31-40 tahun	45	45%
>40 tahun	22	22%
Jumlah	100	100

Sumber : Data primer yang diolah penulis, 2012

Berdasarkan tabel 4.3 yang diketahui bahwa responden yang berusia < 30 tahun berjumlah 33 orang atau sebesar 33%, 31-40 tahun berjumlah 45 orang atau sebesar 45%, dan > 40 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 22%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia > 40 tahun. Hal ini disebabkan pada usia 31-40 tahun masyarakat memiliki pekerjaan mapan.

4.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel IV.4

Profil Responden Berdasarkan pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA atau sederajat	27	27%
Diploma	35	35%
Sarjana	38	38%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah penulis, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 27 orang sebesar 27%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma (D1,D2, dan D3) sebanyak 35 orang atau 35% responden dengan pendidikan Sarjana (S1, dan S2) sebanyak 38 orang atau 38%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian ini berpendidikan terakhir Sarjana (S1,dan S2). Hal ini disebabkan karena responden yang berpendidikan Sarjana yang banyak melakukan pelaporan Surat Setoran Pajaknya pada saat penyebaran kuesioner pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

4.1.4 Profil Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan Jenis Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel IV.5
Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	-	
Pegawai Negeri	38	38%
Pegawai Swasta	45	35%
Wiraswasta	17	17%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer yang diolah penulis, 2012

Berdasarkan Tabel IV.5 dapat diketahui bahwa responden yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 0 dan yang bekerja sebagai pegawai negeri berjumlah 38 orang atau sebesar 38%, yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 45 orang atau 45%, dan yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 17 orang atau 17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini bekerja sebagai pegawai swasta. Hal ini disebabkan karena responden yang bekerja sebagai pegawai swasta banyak melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

4.1.5 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6
Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan	Jumlah Responden	Persentase
< 2 juta	22	22%
2-5 juta	67	67%
5-8 juta	18	18%
> 8 juta	3	3%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.6 dapat diketahui bahwa responden yang berpenghasilan < 2 juta berjumlah 22 orang atau sebesar 22%, 2-5 juta berjumlah 67 orang atau sebesar 67%, 5-8 juta berjumlah 18 orang atau sebesar 18% dan > 8 juta berjumlah 3 orang atau sebesar 3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpenghasilan 2-5 juta. Hal ini disebabkan karena responden berpenghasilan diatas 2-5 juta lebih banyak yang melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

4.2 Deskriptif Statistik

Tabel IV.7
Statistik Deskriptif Responden

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN	100	15.00	33.00	25.8200	4.13504
KESADARAN WAJIB PAJAK	100	17.00	38.00	29.6200	4.88407
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	17.00	33.00	26.3900	4.03994
Valid N (listwise)	100				

Dalam tabel 4.7 terlihat bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan mempunyai nilai minimum 15,00 nilai maksimum 38,00 dan rata-rata 25,8200. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 25,8200 maka responden mempunyai pemahaman tentang persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan lebih tinggi.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 17,00 dan nilai maksimum sebesar 38,00 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 29,6200. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi 29,6200 maka responden mempunyai pemahaman tentang kesadaran wajib pajak lebih tinggi.

4.3. Pengujian Kualitas Data

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layakannya data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel. Oleh karena itu kuesionernya layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian.

4.3.1 Uji Validitas

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui valid suatu variabel, dilakukan pengujian teknik *reliability analysis* dengan nilai korelasi di atas 0,30.

Tabel IV.8
Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan (X1)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	25.8200	17.099	.724	.718	.742
X1.2	25.8000	18.808	.436	.678	.787
X1.3	25.9000	16.859	.704	.702	.743
X1.4	25.8200	18.270	.552	.593	.769
X1.5	25.8300	19.375	.373	.672	.797
X1.6	25.7300	19.613	.443	.559	.785
X1.7	25.9600	18.039	.551	.442	.769
X1.8	25.7800	20.052	.306	.178	.806

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian 2012

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X1.1 sebesar 0.724, X1.2 sebesar 0.436, X1.3 sebesar 0.704, X1.4 sebesar 0.552, X1.5 sebesar 0.373, X1.6 sebesar 0.443, X1.7 sebesar 0.551, dan X1.8 sebesar 0.306. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0.306 artinya seluruh item tersebut dinyatakan valid jika dilihat dari output pengujian validitas ini dan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi $> 0,30$.

Tabel IV.9
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	25.5600	19.825	.412	.535	.776
X2.2	25.9000	19.283	.416	.207	.777
X2.3	26.1800	17.745	.617	.548	.743
X2.4	25.7100	20.309	.344	.530	.786
X2.5	25.9500	17.886	.608	.485	.745
X2.6	26.1400	18.283	.535	.332	.757
X2.7	25.6900	19.206	.411	.187	.778
X2.8	26.2100	18.006	.600	.555	.746

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian 2012

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas X2.1 sebesar 0.412, X1.2 sebesar 0.416, X1.3 sebesar 0.617, X1.4 sebesar 0.344, X1.5 sebesar 0.608, X1.6 sebesar 0.535, X1.7 sebesar 0.411, dan X1.8 sebesar 0.600. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0.344 artinya seluruh item tersebut dinyatakan valid jika dilihat dari output pengujian validitas ini dan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi $> 0,30$.

Tabel IV.10
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	22.4700	12.979	.336	.153	.707
Y.2	22.3900	13.089	.389	.415	.693
Y.3	22.7500	13.058	.325	.222	.710
Y.4	22.5500	13.038	.400	.615	.691
Y.5	22.5000	13.182	.390	.553	.693
Y.6	22.8400	11.267	.579	.851	.642
Y.7	22.8400	11.287	.575	.850	.643

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian 2012

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas Y.1 sebesar 0.336, Y.2 sebesar 0.389, Y.3 sebesar 0.325, Y.4 sebesar 0.400, Y.5 sebesar 0.390, Y.6 sebesar 0.579, dan Y.7 sebesar 0.575. Hasil uji validitas menunjukkan nilai terendah yaitu 0.325 artinya seluruh item tersebut dinyatakan valid jika dilihat dari output pengujian validitas ini dan memenuhi syarat untuk valid karena memiliki korelasi $> 0,30$.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar $(\alpha) < 0,6$

tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 *acceptable*, 0,7-0,8 baik, (d) >0,8 sangat baik (Sekaran, 2000:171).

Tabel IV.11
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
<i>Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan (X₁)</i>	0,798	Reliabel
<i>Kesadaran Wajib Pajak (X₂)</i>	0,787	Reliabel
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	0,717	Reliabel

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan (X₁) menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0.798, koefisien reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X₂) menunjukkan nilai 0.787, koefisien instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0.717. Dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

4.4 Pengujian Asumsi Klasik

Modal regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik apabila memenuhi asumsi klasik sebagai berikut :

4.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorof-smirnov*, kriteria ujinya adalah jika setiap variabel *K-S-Z* dengan *Pvalue/sig.*(2-tailed) >0.05 hal ini menunjukkan bahwa data normal dan sebaliknya.

Tabel IV.12

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN	KESADARAN WAJIB PAJAK	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
N		100	100	100
Normal	Mean	25.8200	29.6200	26.3900
Parameters ^a	Std. Deviation	4.13504	4.88407	4.03994
Most Extreme	Absolute	.112	.126	.135
Differences	Positive	.058	.071	.063
	Negative	-.112	-.126	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.123	1.255	1.349
Asymp. Sig. (2-tailed)		.160	.085	.053

a. Test distribution is Normal

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, 2012

Tabel IV.12 menunjukkan nilai K-S-Z untuk persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan adalah sebesar 1,123 dengan signifikansi sebesar 0,160. Nilai K-S-Z untuk kesadaran wajib pajak adalah sebesar 1,255 dengan signifikansi sebesar 0,085. Nilai K-S-Z untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,349 dengan signifikansi sebesar 0,053.

Apabila nilai signifikansi masing-masing variabel dibandingkan dengan $=0,05$, maka nilai signifikansi K-S-Z tersebut diatas $= 0,05$, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan bebas Multikolinearitas apabila nilai tolerance $VIF < 5$, tetapi jika $VIF > 10$ maka dianggap ada Multikolinearitas. Hasil uji Multikolinearitas dapat disimpulkan seperti pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel IV.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.127	.895		4.612	.000		
PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN	-.180	.070	-.184	-2.571	.012	.230	4.343
KESADARAN WAJIB PAJAK	.909	.059	1.098	15.327	.000	.230	4.343

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, Tahun 2012

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa variabel persepsi Wajib pajak atas sanksi perpajakan (X1) mempunyai nilai *tolerance* 0.230 dan nilai VIF 4.343 variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai nilai *tolerance* 0.230 dan nilai VIF 4.343. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, sehingga dapat diputuskan bahwa semua variabel bebas multikolinearitas dan layak digunakan karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari besaran nilai *Durbin-Watson* (DW). Kriterianya sebagai berikut:

1. Jika D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Jika D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

Tabel IV.14
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.941 ^a	.885	.883	1.38233	2.096

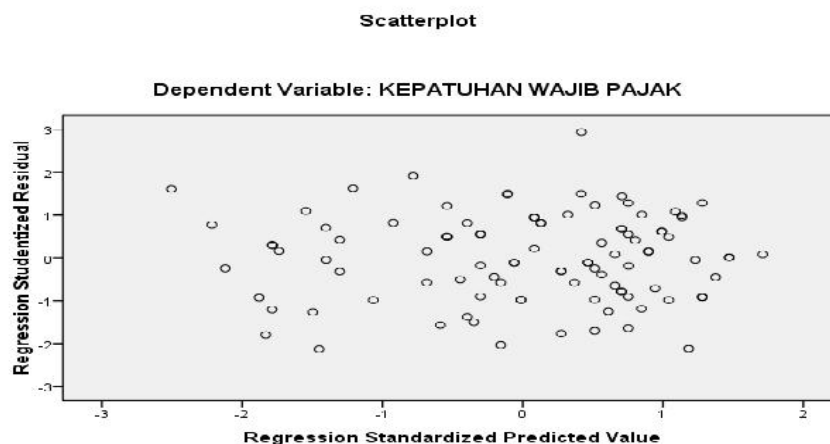
a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, 2012

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai D-W diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 2, 096. Hal ini berarti model regresi diatas tidak terdapat masalah autokorelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

4.4.4 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, 2012

Dari grafik terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y.

4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat (dependent variabel) dengan dua atau lebih variabel (independent variabel). Pengolahan data ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) 16.0 dalam melakukan regresi dilakukan dengan metode enter.

Metode enter semua variabel Independen digunakan sebagai predictor atas kriteria dalam penelitian ini, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Dengan demikian semua variabel independen digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh terhadap variabel dependen. Gambaran umum hasil analisa regresi dengan metode enter dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.15
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.127	.895		4.612	.000		
PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN	-.180	.070	-.184	-2.571	.012	.230	4.343
KESADARAN WAJIB PAJAK	.909	.059	1.098	15.327	.000	.230	4.343

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, tahun 2012

Dari koefisien regresi pada tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam analisis sebagai berikut :

$$Y \text{ (Kepatuhan Wajib Pajak)} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 4.127 + 0.180X_1 + 0.909X_2 + e$$

Penjelasan :

1. Nilai konstanta sebesar 4.127, menyatakan bahwa jika variabel independen tetap atau bernilai nol maka variabel dependen adalah sebesar 4.127 dianggap konstan.
2. Melalui pengetahuan hasil regresi X1 menunjukkan nilai variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar -0.180. hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif, yang berarti setiap peningkatan 1 poin persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,180..
3. Melalui pengetahuan hasil regresi X2 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.909. hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 poin kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,909.

Dari persamaan regresi diatas maka dapat diketahui bahwa variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.1 Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji t)

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari variabel independen dengan variabel dependen, maka dilakukan *uji t*. *Uji t* dianalisis dengan membandingkan nilai *t hitung* dengan nilai *t table*. Jika *t hitung* > *t tabel* maka variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat. *Uji t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan jika nilai signifikan masing-masing variabel < 0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini tingkat Alpha adalah 0.05. dan *degree of freedom* (df) = n-k

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau p value > α dikatakan tidak signifikan, dan Hipotesis penelitian ditolak.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dikatakan signifikan, dan hipotesis diterima.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 diperoleh koefisien regresi variabel bebas sebagai berikut :

Tabel IV.16
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.127	.895		4.612	.000
PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN	-.180	.070	-.184	-2.571	.012
KESADARAN WAJIB PAJAK	.909	.059	1.098	15.327	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

$$t_{\text{tabel}} = \alpha/2 ; n-k$$

$$0.05/2 ; 100-3$$

$$0.025 ; 97$$

$$t_{\text{tabel}} = 1.984$$

a. Pengujian H_1 Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar -0.180 berarti ada hubungan negatif antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya . Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} \text{ sebesar } -2.571$$

$$t_{\text{tabel}} \text{ sebesar } 1.984$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}, \text{ maka } H_1 \text{ ditolak}$$

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ester Tambunan (2011) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Liberti Pandiangan (2010) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan demikian maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

b. H₂ Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien kesadaran wajib pajak 0.909 berarti ada hubungan positif antara Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajaknya. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut :

t_{hitung} sebesar 15.327

t_{tabel} sebesar 1.984

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₂ diterima

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tambunan Ester Tambunan (2011) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Safri Nurmantu (2005) menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Liana Ekawati (2009) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.

4.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis simultan sebagai berikut:

Tabel IV.17
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1430.440	2	715.220	374.299	.000 ^a
Residual	185.350	97	1.911		
Total	1615.790	99			

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Hasil uji statistik ini akan berpengaruh jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel anova diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $374,299 > F_{tabel} 3,090$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ester Tambunan (2011) yaitu semakin baik persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan dengan kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya yang terutang sehingga penerimaan pajak negara akan meningkat.

4.6 Koefisien Determinasi R^2

Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R^2 bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R^2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan demikian R^2 bernilai 0-1. Berikut ini tabel hasil perhitungan R^2 dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.

Tabel VI.18
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.883	1.38233

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : pengolahan Data SPSS Hasil Penelitian, 2012

Dari hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,885 atau 88,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 88,5% sedangkan sisanya $100\% - 88,5\% = 11,5\%$ merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan statistik $t_{hitung} -2.571 > t_{tabel}$ sebesar 1.984 maka H_1 diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,012 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan keseluruhan baik, hal ini berarti bahwa wajib pajak menilai pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, para wajib pajak mengetahui bahwa pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
2. Berdasarkan statistik $t_{hitung} 15.327 > 1.984 t_{tabel}$ sebesar maka H_2 diterima dengan nilai signifikan 0,000 berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut kesadaran wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sadar membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

3. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} 374.299 > F_{tabel}$ sebesar 3.090 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. hal ini menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti variabel bebas (persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kepatuhan wajib pajak termasuk kriteria tinggi yang berarti wajib pajak telah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas dan kemudian wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
5. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0.885 (88,5%) artinya dugaan dari kedua variabel sebesar 88,55% variabel dependent mempengaruhi variabel dependent. Sebesar 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak telah terbukti membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari menegakkan sanksi perpajakan pada pelanggar aturan perpajakan diharapkan aparat pajak lebih tegas dalam hal penegakan sanksi kepada pelanggar aturan.
2. Lebih baik jika pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempertegas fungsi pajak terhadap negara sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan Negara sehingga mereka tidak akan melakukan penundaan pembayaran pajak yang akan merugikan negara.
3. Diharapkan terus terjadi peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pajak agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga wajib pajak memiliki persepsi atau *image* yang positif sehingga dapat terciptanya *voluntary compliance*.
4. Aparat pajak sebaiknya menambah intensitas penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak mengenai cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak terutang, membayar

pajak dan mengisi SPT bagi masyarakat dan wajib pajak yang belum memahami.

5. Sebaiknya bagi petugas pajak yang perlu ditingkatkan adalah untuk menambah pandangan positif para wajib pajak agar terlaksananya *voluntary compliance* yaitu kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya peningkatan kualitas pelayanan jasa, profesionalisme dan kejujuran dari petugas pajak.
6. Untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka pada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat Attaubah Ayat 29

Devano, S. & Rahayu, S, K. 2010. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta, Prinadi Media Group.

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2010 tentang Daftar Kanwil DJP Berdasarkan kelompok Target Rasio Kepatuhan SPT Tahun 2011*.

Early Suandy, 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Erlangga.

Ekawati, Liana. 2009. *Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja*. Skripsi Universitas Komunikasi Indonesia.

Faisal, GS.M. 2009. *How to Be a Smarter Taxpayer*. Jakarta : Grasindo.

Ghozali , Imam. 2006. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo

Irianto, S.E (2005). *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Ilyas, Wiryawan B. Dan Ricard Burton.2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Jalaludin, Rahman. 2004. *Psikologi Komunikasi* (edisi III). Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas diponegoro : Tesis Magister Akuntansi.

Hutagaol, J, Pradipta, A & Winarto ,W.W.2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Akuntabilitas*, 186-193.

Judiseno, Rimsky, K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis. Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2008. 1013. Jakarta.

Kiryanto. 2006. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. EKOBIS.Vol 1 No.1, hlm.41 – 52.

Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi,Yogyakarta.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Pandiangan, Liberty. 2011. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

P.Siahaan, Marihot . 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Priyatno, Dwi, 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Penerbit MediaKom, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Balai Pustaka.

Rahayu, Siti K. 2010. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta.

Sekaran Uma, 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian Bisnis*, Bandung : CV.Alfabeta.

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Supranto, J. 2005. *Ekonomi Buku Kesatu*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Tambunan, Ester, 2011. *Skripsi (pengaruh Persepsi Wajib Pajak sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying)*. Universitas Komunikasi. Bandung.

Umar, Husein,2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009. Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : andi Offset.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. 2011-2012. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta.
<http://www.pajak.go.id>

<http://www.bisnis.com/articles/wajib-pajak->